

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
RETRIBUSI PASAR
PADA MASA DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :
Tiffany Lembah Redati
NIM : 032114069**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2008**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
RETRIBUSI PASAR
PADA MASA DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :
Tiffany Lembah Redati
NIM : 032114069**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2008**

Skripsi

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
SERTA FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
RETRIBUSI PASAR
PADA MASA DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul)**

Oleh :

Tiffany Lembah Redati

NIM : 032114069

Telah Disetujui oleh:

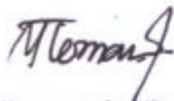
Pembimbing I,



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Tanggal: 19 September 2008

Pembimbing II,



MT. Ernawati, SE, MA

Tanggal: 20 Oktober 2008

Skripsi
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
SERTA FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
RETRIBUSI PASAR
PADA MASA DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul)

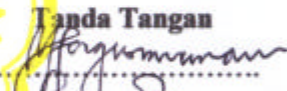

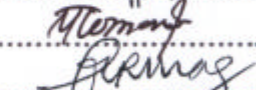


Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Tiffany Lembah Redati

NIM : 032114069

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2008
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, SE, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	MT. Ernawati, S.E., M.A.	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	

Yogyakarta, 29 November 2008

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Menjadi orang penting itu baik tapi menjadi orang baik itu lebih penting

Where there is a will, there is a way

Vini vidi vici

- ☞ Sujud dan Ibadahku padamu kekasihku ya Robbi “Allah SWT” pemilik segala misteri dan keajaiban, rahasia terbesar hidupku, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terimakasih atas segala kenikmatan yang engkau berikan kepada hamba selama ini.*
- ☞ Rasulallah SAW bersama Hadist dan kitabnya Al-quran, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir jaman.*
- ☞ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mengiringi doa, nasehat, kasih sayang serta perhatian yang tercurah buat penulis selama ini dan telah memberikan segalanya demi sebuah asa anaknya.*
- ☞ Mas Edho, mbak Ellen dan ponakanku Pruistin dan Avarelia.*
- ☞ Seseorang yang selalu ada di hati yang tidak pernah lelah memberikan dukungan baik suka maupun duka di dalam sebuah penantian.*

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRIBUSI PASAR PADA MASA DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH” (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul)** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 28 November 2008 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 28 November 2008

Yang membuat pernyataan,



Tiffany Lembah Redati

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Tiffany Lembah Redati

Nomor Mahasiswa : 032114069

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar Pada Masa Diberlakukannya Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal: 28 November 2008

Yang menyatakan



(Tiffany Lembah Redati)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi serta Faktor-faktor yang Memengaruhi Retribusi Pasar pada Masa Diberlakukannya Otonomi Daerah”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- a. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
- b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si, Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma dan Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis serta memberikan koreksi dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
- d. MT. Ernawati, SE, MA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi, saran dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- e. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan disiplin ilmu selama penulis kuliah, seluruh staf secretariat, staf administrasi dan UPT Perpustakaan.
- f. Bapak dan Ibu di Bappeda, Dipenda dan BPS Kabupaten Bantul yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
- g. Orangtuaku tercinta, Papa Arry Pribadie dan Mama Tri Susilowati yang telah membesarkan, membiayai dan memberikan kasih sayang serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
- h. Kakakku Edho UW dan Ellen Aprilina serta keponakanku tersayang Prustin dan Avarelia yang selalu mengiringi canda tawa penulis, dan keluarga besarku di Bantul dan Jepara.
- i. Untuk Eddo Triskha yang selalu menemani penulis dan mendukung sepenuhnya penyusunan skripsi ini dengan cinta. Terima kasih untuk semuanya.
- j. Teman-teman Akuntansi angkatan 2003 khususnya kelas B (Ngunz, Stanis, Satya, Lisa, Novel, Mega, Febri, Anggi, Gordi, Yoyok, Wok2, Ade, Hera, Uli, Fifi, Putri, Resa, Yuli, Dian, Yudya, Nina, Yongki, Pepenk, Singgih, Seno, dll). Terima kasih selalu menjadi teman yang terbaik buat aku.
- k. Sahabatku Desti yang selalu ada di saat penulis membutuhkan dan untuk mas Aris atas segalanya (waktu, dukungan, kasih dan sayang) yang telah diberikan ke penulis.
- l. Anak-anak kelas MPT (Memes, Lia, Witha, Eka, Endar, Niken, Reni). Makasih atas masukannya selama ini.

- m. Untuk teman-teman baikku Putri, Yeni, Michelle, Dian kusus, Yayan, Titis, Fredi, Petty, Kepik, dan teman-teman KKP, Vero, Welly, Yudha, mbak Lusi, Sarah, dan teman-teman TIC Yogyakarta (Panji, Janti, Oki, Andi, Kris, Ijonk, Ani, Bani, Devi, Wahyu, dll), juga teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas pertemanannya.
- n. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan penulis satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 28 November 2008



TIFFANY LEMBAH REDATI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Teori	10
1. Pemerintah Daerah	10
2. Otonomi Daerah	10
3. Pendapatan Asli Daerah	12
4. Retribusi Daerah	14
5. Retribusi Pasar	18
6. Efektivitas dan Efisiensi	21
a. Efektivitas	21
b. Efisiensi	22
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Subyek dan Obyek Penelitian	28

	C. Data yang dicari	28
	D. Populasi dan Sampel	29
	E. Teknik Pengumpulan Data	30
	F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV	GAMBARAN UMUM	34
	A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul	34
	1. Kilas Sejarah	34
	2. Kondisi Geografis	35
	a. Letak Kabupaten Bantul	35
	b. Tata Guna Tanah	36
	B. Pemerintahan	37
	C. Kependudukan	38
	D. Agama dan Sosio Kultural	39
	E. Industri	39
	F. Kondisi Perekonomian	40
	G. Kondisi Perpajakan	41
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	44
	A. Analisis Efektivitas dan Efisiensi	44
	1. Analisis Efektivitas Retribusi Pasar	44
	2. Analisis Efisiensi Retribusi Pasar	47
	3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar	50
	B. Pembahasan	51
	1. Analisis Efektivitas Retribusi Pasar	51
	2. Analisis Efisiensi Retribusi Pasar	55
	3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar	56
BAB VI	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Keterbatasan Penelitian	62
	C. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2003 – 2007 3
Tabel 2.1	Tarif Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul 20
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan Kabupaten Bantul Tahun 2007 37
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2006 38
Tabel 4.3	PDRB Tahun 2000-2003 41
Tabel 4.4	PDRB Tahun 2004-2006 41
Tabel 4.5	Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2000-2007 42
Tabel 4.6	Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul Tahun 2000-2007 43
Tabel 5.1	Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten Bantul Tahun 2000-2007 47
Tabel 5.2	Efisiensi Retribusi Pasar Kabupaten Bantul Tahun 2000-2007 49
Tabel 5.5	Jumlah Lebih Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul Tahun 2000 - 2007 53

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRIBUSI PASAR PADA MASA DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Tiffany Lembah Redati
NIM : 032114069
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2008

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Apakah Retribusi Pasar tiap tahunnya pada masa diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Bantul tahun 2000 sampai dengan 2007 telah efektif, (2) Apakah Retribusi Pasar tiap tahunnya pada masa diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Bantul tahun 2000 sampai dengan 2007 telah efisien, dan (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan teknik analisis kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerimaan Retribusi Pasar tiap tahunnya pada masa diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Bantul tahun 2000 sampai dengan 2007 telah efektif, kecuali untuk tahun 2002, (2) Penerimaan Retribusi Pasar tiap tahunnya pada masa diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Bantul tahun 2000 sampai dengan 2007 telah efisien, dan (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul adalah sikap aparat, kesadaran masyarakat, aturan yang berlaku dan peran pemerintah.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY AND FACTORS INFLUENCING MARKET RETRIBUTION WHEN THE REGIONAL AUTONOMY IS IMPLEMENTED A Case Study at the Regional Goernment of Bantul

Tiffany Lembah Redati
NIM : 032114069
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2008

The purpose of this research was to find out (1) whether or not the market retribution for every year was already effective when the regional autonomy in Bantul regency was implemented in the years of 2000 to 2007, (2) whether or not the market retribution for every year was also already efficient, and (3) what were the factors influencing the market retribution revenue in Bantul Regency.

The type of this research was a case study where data were obtained by performing interview, documentation and questionnaire. While the techniques of data analysis used were qualitative and quantitative analysis.

The result of research indicated that (1) the market retribution revenue for every year was already effective when regional autonomy was implemented in Bantul regency in the years of 2000 to 2007, except for the year of 2002, (2) the market retribution for every year was also already efficient, and (3) the factors influencing market retribution revenue in Bantul Regency were the attitude of government officer, people's awareness, regulation implemented and government role.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara mulai muncul sejak tahun 1998. Hal ini timbul karena tuntutan rakyat yang semakin banyak dan beragam. Masyarakat menuntut agar dapat berperan secara aktif dan terlibat dalam mewujudkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dalam konteks pembangunan daerah, keinginan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah merupakan suatu usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar tercipta kemandirian daerah yang lebih besar. Selama ini, pembiayaan pembangunan bagi kebanyakan daerah di Indonesia sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2000, telah membawa perubahan yang penting dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu dari pola yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Kewenangan dan tanggung jawab daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri semakin besar. Pola sentralisasi yang selama ini berlaku akan semakin menyusut, dan

desentralisasi kekuasaan akan meluas. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Konsekuensi setiap daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuannya dalam segala hal, terutama dalam kemampuan keuangan daerah melalui usaha meningkatkan PAD agar dapat mandiri dan merupakan upaya untuk tidak selalu tergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah memerlukan dana sebagai pendapatan daerah yang didapat dari PAD, baik pajak maupun non-pajak, dimana sebagian besar diperoleh dari pajak dan retribusi. Selain itu didukung juga oleh dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah.

Salah satu potensi yang perlu digali oleh pemerintah daerah adalah dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sumber dari PAD sendiri meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan. Retribusi daerah sendiri pada umumnya memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan suatu daerah, selain pajak daerah. Hal ini perlu

disikapi secara khusus sehingga dapat dikaji lebih dalam bagaimana sebenarnya peran serta dari retribusi daerah itu bagi daerah sendiri.

Mencermati besaran PAD pada Kabupaten Bantul, sektor retribusi daerah memberikan peran yang berarti bagi keuangan daerah. Sebagai salah satu sumber PAD, retribusi menempati urutan pertama. Oleh karena itu, peranannya menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan rutinnya. PAD Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2003 – 2007
(rupiah)

No.	Komponen PAD	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Pajak Daerah	6.600.583.794,-	7.085.891.785,-	7.837.546.787,-	9.836.299.528,-	10.191.535.467,00
2	Retribusi Daerah	18.489.365.638,-	19.186.122.250,60	23.800.473.870,-	22.451.031.417,-	30.808.408.803,00
3	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	3.467.226.010,72	3.075.748.742,12	2.912.785.812,49	2.579.134.676,79	3.014.646.125,98
4	Lain-lain PAD yang Sah	4.325.183.047,68	1.426.777.904,11	3.279.981.193,88	9.181.932.397,88	13.215.136.097,64

Sumber : DIPENDA Kabupaten Bantul

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan melalui retribusi daerah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan. Penerimaan dari sektor retribusi daerah mempunyai peran penting dalam peningkatan PAD sehingga pemerintah daerah dapat memaksimalkan usahanya dalam sector ini. Keleluasaan daerah untuk selalu mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi ini menjadi tanggung jawab masing-

masing daerah dalam upaya mengelola berbagai fasilitas yang dimiliki atau jasa yang dipungut retribusi.

Retribusi daerah sebagai elemen penting dalam PAD mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pembangunan daerah. Retribusi daerah menjadi salah satu komponen yang penting yang mampu meningkatkan PAD karena retribusi merupakan pembayaran dari rakyat kepada pemerintah akibat adanya hubungan balas jasa atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan dipakai oleh rakyat. Dalam pengelolaannya, retribusi daerah harus dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka optimalisasi dan usaha peningkatan PAD. Dari berbagai jenis retribusi daerah, salah satu yang menonjol adalah penerimaan retribusi pasar.

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis dari retribusi jasa umum yang turut menentukan seberapa besar penerimaan PAD. Hal tersebut dikarenakan PAD merupakan tolok ukur kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam beberapa tahun ini, penerimaan daerahnya dinilai cukup baik ditandai dengan penerimaan retribusi daerah dan penerimaan PAD yang meningkat tiap tahunnya.

Retribusi pasar di kabupaten Bantul memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi pasar menjadi andalan bagi pemerintah Kabupaten Bantul dan mendukung kemajuan bagi pembangunan daerah. Selain itu setiap kecamatan di

Kabupaten Bantul umumnya memiliki pasar, sehingga hal tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bantul berkembang pesat. Pasar di Kabupaten Bantul merupakan tempat penampungan hasil bumi daerah yang kemudian didistribusikan ke masyarakat, sehingga pasar di Kabupaten Bantul peranannya sangat penting bagi masyarakat.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Kemudian efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Dengan membandingkan realisasi dan target penerimaan retribusi pasar maka akan diketahui tingkat efektivitasnya. Begitu pula untuk efisiensinya yang dapat diketahui dari rasio pemungutannya. Jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100% dapat dikategorikan efisien, dan semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Kinerja pemerintah daerah yang semakin baik akan berdampak terhadap kesuksesan dan kemandirian dari suatu daerah serta retribusi pasar tetap dapat dijadikan sebagai elemen yang mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul setiap tahunnya pada masa diberlakukannya otonomi daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 telah efektif ?

2. Apakah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul setiap tahunnya pada masa diberlakukannya otonomi daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 telah efisien ?
3. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul setiap tahunnya pada masa diberlakukannya otonomi daerah telah efektif.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul setiap tahunnya pada masa diberlakukannya otonomi daerah telah efisien.
3. Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan kepustakaan dan bahan bacaan yang berguna dalam bidang sektor publik bagi seluruh mahasiswa Universitas Sanata Dharma, sehingga dapat menambah pengetahuan dalam memahami Retribusi Daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaannya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai referensi tentang efektivitas dan efisiensi dari Retribusi Pasar serta sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka untuk tujuan meningkatkan penerimaan daerah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk mempraktekkan teori dan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah serta dapat mengembangkan wawasan dan menambah pengetahuan di bidang sektor publik, khususnya Retribusi Daerah.

E. Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab I ini yang akan dibahas adalah sejarah munculnya Otonomi Daerah yang dipengaruhi oleh tuntutan rakyat untuk lebih mandiri dalam pengelolaan daerahnya masing-masing. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana perkembangan pendapatan daerah di Kabupaten Bantul. Dari latar belakang tersebut, dilanjutkan dengan merumuskan masalah tentang efektivitas dan efisiensi Retribusi Pasar, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dari skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab II yang dibahas adalah mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. Pembahasan berupa uraian dan pengertian tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah,

Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, serta Efektivitas dan Efisiensi. Selain itu juga diuraikan tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Sumber dari kajian pustaka didapatkan dari jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dan sebagainya yang topiknya mendekati atau sama dengan penelitian yang ada di skripsi ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab III membahas mengenai penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan, yaitu berupa studi kasus dengan tempat penelitian adalah Kabupaten Bantul dan uraian tentang waktu penelitian. Pembahasan selanjutnya mengenai obyek peneliti berupa data-data yang berkaitan dengan Retribusi Daerah serta cara mengenai teknik analisis datanya. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, dokumentasi, dan kuisioner.

BAB IV : Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Pada bab IV yang dibahas adalah tentang Kabupaten Bantul, batas-batas wilayahnya, luas wilayahnya dan sekilas tentang perkembangan daerah tersebut sampai dengan saat ini.

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab V ini yang dibahas mengenai perhitungan efektivitas dan efisiensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul. Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Dari perhitungan

tersebut diketahui hasilnya yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya. Selain itu juga dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar.

BAB VI : Penutup

Bab VI ini membahas kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan penghitungan serta analisis tentang efektivitas dan efisiensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar tersebut . Selain itu juga berisi tentang masukan dari pihak penulis yang ditujukan kepada pihak yang terkait, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2000 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Perangkat daerah yang dimaksudkan sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No.32 Tahun 2000 terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

2. Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani. *Auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2000 Pasal 1, "Otonomi daerah yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan", dan "Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)".

Dalam konsep otonomi daerah tersebut terkandung asas-asas dan prinsip-prinsip kemandirian daerah dalam pelaksanaannya. Walaupun otonomi ini sebagai bentuk pelimpahan yang luas atas kewenangan daerah, namun keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat masih memiliki wewenang untuk menjaga kestabilan roda pemerintahan negara.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2000, otonomi daerah menganut prinsip yang luas, nyata dan bertanggung-jawab, yaitu :

1. Luas adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. Nyata adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh hidup dan berkembang di daerah.
3. Bertanggung-jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan Kepala Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pemeliharaan hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara.

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (otonomi daerah) yang diperbaharui menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2000 mulai diberlakukan sejak Januari 2001. Bagi daerah-daerah dengan otonomi ini akan memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsanya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakatnya, sesuai Undang-Undang yang berlaku (UU No.22/1999, pasal i-h). Masalah pendanaan akan lebih banyak tergantung pada kemampuan daerah sendiri untuk mengoptimalkan pendapatannya, sehingga bisa membiayai pengeluaran untuk mendukung berbagai program yang sudah direncanakan, karena daerah tidak bisa lagi mengandalkan pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat seperti yang selama ini terjadi.

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut penjelasan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung-jawab daerahnya.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dalam hal ini, faktor keuangan merupakan faktor essential dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Sehubungan dengan pentingnya keuangan menurut Pamudji (1980: 61), "Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri".

Adapun sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Hasil Pajak Daerah,

b. Hasil Retribusi Daerah,

c. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

d. Lain-lain pendapatan yang dipisahkan, antara lain adalah bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

2. Dana Perimbangan
 - a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam,
 - b. Dana Alokasi Umum, dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, antara lain adalah hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.

4. Retribusi Daerah

Menurut Wagner dan Goedhart (1993: 94), terdapat dua karakteristik yang penting dalam retribusi, yaitu :

- a. Adanya sifat kontraprestasi tertentu yang langsung dapat ditunjuk bagi jasa yang diberikan oleh negara.
- b. Prestasi negara yang bersangkutan dilakukan berdasarkan tugas spesifik negara.

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan pada pemakai jasa tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu, ada beberapa pengertian tentang retribusi, yaitu :

- a. "Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh daerah" (Bachrul Elmi, dikutip oleh Abdul Halim 2000: 52).
- b. "Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan” (Suparmoko 2002: 85).

- c. ”Retribusi adalah penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara dan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat dalam hubungannya yang bersifat publik” (Soetrisno 1981: 202).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah imbalan yang diterima pemerintah dan masyarakat yang berupa sejumlah uang sebagai balas jasa atas sesuatu yang pernah digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang atau masyarakat umum. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari retribusi secara mendasar adalah :

- a. Retribusi dipungut oleh negara.
- b. Dalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa yang disediakan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2001, retribusi daerah dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu (Prakosa 2003: 89) :

- a. Retribusi Jasa Umum

Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Pemeriksaan Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas penggunaan pemanfaatan jasa usaha yang khusus disediakan oleh

Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan bukan disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut ;

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir
5. Retribusi Tempat Penitipan Anak
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12. Retribusi Pengolahan limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subyek retribusi jasa usaha dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Obyek retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek.

Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah No.66 Tahun 2001, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang, antara lain adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah sesuai dengan penjelasan peraturan pemerintah No.66 Tahun 2001 Pasal 6 tentang retribusi lain-lain.

5. Retribusi Pasar

a. Pengertian Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar menyebutkan bahwa Retribusi

Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Menurut Goedhart (1975:123), pungutan retribusi pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Menurut sifat prestasi negara, retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan milik pemerintah daerah sebagai konsekuensi penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan.
2. Menurut cara penentuan jumlah pungutan, retribusi pasar merupakan retribusi variabel, yaitu jumlah pungutan tergantung dari kelas pasar, golongan dagangan, luas toko, petak atau gudang atau los yang digunakan serta tempat berdagang.
3. Menurut cara pembayarannya, retribusi pasar termasuk retribusi kontan. Untuk jasa pemakaian bukan kios menggunakan sistem pembayaran tiap hari, sedangkan jasa untuk pemakaian kios pembayarannya dengan sistem harian atau mingguan.

b. Subyek dan Obyek Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, yang dimaksud sebagai subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Sedangkan yang dimaksud obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan pasar tradisional berupa halaman/pelataran, los atau kios dan khusus disediakan untuk pedagang, serta bukan termasuk yang dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

c. Pemungutan Retribusi Pasar

Pemungutan retribusi pasar diatur dalam peraturan retribusi daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar para pembayar retribusi menyadari akan hak dan kewajibannya. Agar pemungutan retribusi pasar dapat tercapai sesuai target maka pihak pemungut atau terpungut harus dapat melaksanakan hak serta kewajibannya dengan benar.

d. Tarif Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, tarif retribusi pasar diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif Retribusi Pasar
Kabupaten Bantul

Lokasi	Jenis Bangunan	Tarif
Pasar Kelas I	a. Los	Rp 125,00/ m^2 /hari
	b. Kios	Rp 175,00/ m^2 /hari
	c. Pelataran	Rp 40,00/ m^2 /hari
Pasar Kelas II	a. Los	Rp 100,00/ m^2 /hari
	b. Kios	Rp 150,00/ m^2 /hari
	c. Pelataran	Rp 30,00/ m^2 /hari
Pasar Kelas III	a. Los	Rp 75,00/ m^2 /hari
		Rp 125,00/ m^2 /hari

Pasar Hewan	b. Kios	Rp 20,00/ m^2 /hari
	c. Pelataran	Rp 3000,00/ekor
	a. Ternak besar	Rp 750,00/ekor
	b. Ternak kecil	

Sumber : Perda Kab. Bantul No.05 Tahun 2000

6. Efektivitas dan Efisiensi

a. Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Ensiklopedi Ekonomi , Bisnis, dan Manajemen (1992: 163) yaitu "Efektivitas adalah menunjukkan bahwa keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya". Sebagai kriteria dari efektivitas menurut Ensiklopedi Administrasi (1997: 163) yaitu bahwa, "Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil mungkin dicapai, tetapi dengan penghamburan berupa pikiran, tenaga, waktu dan benda".

Sedangkan menurut Halim (2001: 263), "Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, yaitu menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah".

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Merujuk pengertian efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2001: 263), maka yang dimaksud dengan Efektivitas

Retribusi Pasar yaitu menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan retribusi daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target retribusi daerah yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas Retribusi Pasar} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Target Retribusi Pasar}} \times 100$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2001: 263).

b. Efisiensi

Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992: 163), "Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan".

Sebagai kriteria efisiensi menurut Ensiklopedi Administrasi (1997: 114) bahwa, "Setiap pekerjaan yang efisien juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan dari akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu tercapai".

Menurut Halim (2001: 263), "Efisiensi pendapatan asli daerah yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima".

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Merujuk pengertian efisiensi PAD (Halim, 2001: 263), maka yang dimaksud dengan efisiensi Retribusi Pasar yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi daerah yang diterima.

$$\text{Efisiensi Retribusi Pasar} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Untuk menentukan efisien tidaknya pemungutan retribusi daerah (Halim, 2001: 264) bahwa kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2005) berjudul Kontribusi Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2000 sampai dengan 2004 dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan

menghitung berapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kemudian menilai perkembangan dari penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan analisis *Least Square*. Dari analisis ini didapatkan hasil bahwa :

1. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu antara 35,92% sampai dengan 47,67% dengan rata-ratanya 42,7%.
2. Ada perkembangan penerimaan retribusi daerah yang signifikan di Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2000 hingga 2004.
3. Penerimaan retribusi daerah berkisar antara 94,93% hingga 108,72% dengan rata-rata penerimaan 102,2%, yang berarti kemampuan daerah Kabupaten Karanganyar semakin membaik dan semakin efektif.

Vendayanti (2004) melakukan penelitian dengan judul Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Temanggung dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus proporsi dari retribusi yaitu dengan membandingkan besarnya tiap retribusi dengan total retribusi. Kemudian untuk mengetahui seberapa efektifkah penerimaan retribusi yaitu dengan membandingkan realisasi dan target dari retribusi daerah. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Selama 5 tahun anggaran perkembangan proporsi terkadang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan.

2. Penerimaan retribusi daerah sudah efektif, yaitu berkisar antara 86,02% hingga 111,89% dengan rata-ratanya yaitu 101,71%.
3. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sangat besar, yaitu antara 58,18% hingga 69,47%, atau rata-rata kontribusinya adalah sebesar 63,50%.

Sedangkan penelitian dari Andiaspiningsih (1999) berjudul Pengaruh Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Pemungutan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah. Penelitian dilakukan di Pasar Beringharjo dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik korelasi sederhana, korelasi berganda dan regresi berganda. Dari penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara pelaksanaan koordinasi dan pemungutan retribusi pasar.
2. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara pelaksanaan pengawasan dengan pemungutan retribusi pasar.
3. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap pemungutan retribusi pasar.

Penelitian yang berjudul Posisi Pajak dan Retribusi Sebagai Sumber Penerimaan Daerah di Kota Semarang dilakukan oleh Supramono (2003) dilatarbelakangi dengan menyoroti Undang-Undang No.22 Tahun 1999 bahwa era tatanan baru pemerintahan dengan ditandai oleh adanya otonomi

daerah, ternyata menuntut pemerintah daerah juga ikut siap dalam menyikapi perubahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Boston Consulting Group* (BCG) dan untuk menganalisis optimalisasi dari setiap elemennya dengan menggunakan analisis optimalisasi, yaitu membandingkan realisasi pajak dan retribusi dengan target dari pajak dan retribusi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Hasil identifikasi potensi menemukan hanya beberapa jenis retribusi saja yang mempunyai posisi prima yang dijadikan andalan sumber penerimaan daerah. Antara lain adalah pajak penerangan jalan, retribusi kebersihan, retribusi terminal dan retribusi pengamanan lingkungan pasar.
2. Jika diasumsikan target penerimaan daerah sudah realistis, maka secara keseluruhan komponen pajak dan retribusi daerah sudah tergarap secara optimal.

Soeratno dan Suparmono (2002) melakukan penelitian dengan judul Urgensi Pajak Daerah dan Penghasilan Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan alat analisis trend data runtun waktu, koefisien korelasi dan elastisitas pajak dan retribusi daerah. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa :

1. Pajak daerah dan retribusi merupakan sumber yang dominan bagi penerimaan daerah D.I.Yogyakarta, sehingga mengakibatkan tingginya ketergantungan keuangan daerah pada sumber tersebut.

2. Pajak daerah dan retribusi daerah di seluruh kabupaten, kota dan Propinsi D.I.Yogyakarta bersifat elastis, sehingga keduanya menjadi variabel kunci bagi peningkatan PAD.
3. Pemerintah sangat menggantungkan diri pada pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian yang mendalam mengenai unit sosial tertentu yang menghasilkan gambaran untuk jangka waktu tertentu, karena pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan pada waktu tertentu.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek yang akan diteliti adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul yang terkait dengan penelitian, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul dan Kantor Pelayanan Pasar Kabupaten Bantul.

b. Obyek Penelitian

Obyek yang akan diteliti adalah data realisasi dan target penerimaan retribusi pasar, biaya pemungutan retribusi pasar, penerimaan pendapatan asli daerah, dan hasil dari kuisisioner yang akan disebarakan dalam penelitian.

C. Data yang dicari

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa data, yaitu :

a. Gambaran umum Kabupaten Bantul.

- b. Data Target dan Realisasi Retribusi Pasar periode 2000 hingga 2007.
- c. Data Biaya Pemungutan Retribusi Pasar periode 2000 hingga 2007.
- d. Data Pendapatan Asli Daerah periode 2000 hingga 2007.
- e. Data dari kuisio ner yang disebarakan kepada responden.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah yang membidangi atau terkait dengan masalah retribusi pasar di Kabupaten Bantul.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Untuk sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagian pegawai pemerintahan yang terkait masalah retribusi daerah, khususnya retribusi pasar. Sampel dalam penelitian ini diambil secara *non-random sampling*, yaitu proses pemilihan sampel dimana semua anggota dari populasi memiliki kesempatan untuk dipilih (Kountour, 2003 : 143). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*, yaitu dalam memilih subyek-subyek sampelnya, diambil anggota populasi yang paling mudah untuk diperoleh informasi dan datanya (Sigit, 2001 : 18). Hal tersebut dilakukan dengan alasan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari peneliti. Dalam penelitian ini, jumlah sampel dibatasi sebanyak 30.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung bertatap muka dengan responden atau pihak yang bersangkutan. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian, yaitu dari Dinas Pendapatan Daerah yang mengurus masalah retribusi pasar. Hasil dari wawancara ini adalah data untuk mendukung dan menjawab masalah retribusi pasardan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau catatan tertulis yang relevan dan akurat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan sumber data sekunder yang berupa data dari Badan Pusat Statistik, dan data dari kantor Dinas Pendapatan Daerah yang berhubungan dengan retribusi pasar di Kabupaten Bantul. Hasil dari dokumentasi ini adalah data untuk menjawab masalah pertama dan kedua.

c. Kuisisioner

Penelitian dilakukan juga dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuisisioner kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Metode ini mengumpulkan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan obyek penelitian lalu menyebarkannya kepada responden untuk memperoleh suatu jawaban

yang relevan dengan permasalahan yang ada. Yang menjadi responden dari kuisioner adalah pegawai pemerintahan yang terkait dengan masalah retribusi pasar.

F. Teknik Analisis Data

a. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dari retribusi pasar di Kabupaten Bantul periode selama otonomi daerah (2000-2007) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menghitung efektivitas retribusi pasar setiap tahun dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Efektivitas Retribusi Pasar

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100 \%$$

2) Menentukan apakah hasil dari perhitungan efektivitas retribusi pasar setiap tahun dengan rumus di atas termasuk kriteria efektif atau tidak efektif. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2001 : 263).

b. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi dari retribusi pasar di Kabupaten Bantul periode selama otonomi daerah (2000-2007) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menghitung efisiensi retribusi pasar setiap tahun dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi Retribusi Pasar

$$= \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100 \%$$

- 2) Menentukan apakah hasil dari perhitungan efisiensi retribusi pasar setiap tahun dengan rumus di atas termasuk kriteria efisien atau tidak efisien. Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik (Halim, 2001 : 264).
- c. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner disebarakan kepada pihak pemerintahan yang menangani masalah retribusi daerah, khususnya retribusi pasar di Kabupaten Bantul. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner adalah seputar faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat penerimaan retribusi daerah dan disertai sebab akibatnya. Faktor-faktor yang dinilai dalam penelitian ini adalah dari sudut pandang empat elemen, yaitu :
- a. masyarakat (pedagang),
 - b. aparat (petugas pemungut),
 - c. aturan yang berlaku, dan
 - d. pemerintah.

Dari kuesioner akan diperoleh jawaban untuk menjawab permasalahan yang ketiga. Penilaian untuk kuesioner adalah jika responden menyetujui pernyataan yang diajukan (dengan memilih jawaban “Ya”) dan pernyataan tersebut yang paling banyak dijawab oleh responden maka faktor tersebut yang paling mempengaruhi penerimaan retribusi daerah (*scoring*).

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul

1. Kilas Sejarah

Kabupaten Bantul dikenal sebagai kota perjuangan, dimana sejarah kota Yogyakarta khususnya dan sejarah Indonesia umumnya tidak bisa lepas dari kisah yang ada di Kabupaten Bantul. Antara lain adalah kisah perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah Bantul juga yang menjadi basis Serangan Oemoem 1 Maret 1949 yang dicituskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan Yogyakarta, yaitu :

1. Kabupaten Bantulkarang untuk kawasan selatan.
2. Kabupaten Deggung untuk kawasan utara.
3. Kabupaten Kalasan untuk kawasan timur.

Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 saptar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang dan Raden Tumenggung Mangun Negoro dipercaya sebagai Bupati Bantul. Kemudian untuk selanjutnya tanggal 20 Juli inilah yang dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul.

2. Kondisi Geografis

a. Letak Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan secara geografis Kabupaten Bantul terletak antara :

Bujur timur : $110^{\circ} 12' 34'' - 110^{\circ} 31' 08''$

Bujur selatan : $110^{\circ} 12' 34'' - 110^{\circ} 31' 08''$

Kabupaten Bantul mempunyai luas $508,85 \text{ km}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

Dilihat dari segi topografi, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari 40% dataran rendah dan 60% merupakan daerah perbukitan yang kurang besar. Secara garis besarnya yaitu :

1. **Bagian Barat** : Daerah landai yang kurang dan daerah perbukitan yang membujur dari utara ke selatan dengan luas 89,86 km² (17,73 % dari luas wilayah).
2. **Bagian Tengah** : Daerah datar dan landai yang merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 km² (41,62 %).
3. **Bagian Timur** : Daerah yang landai, miring, dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat seluas 206,05 km² (40,65 %).
4. **Bagian Selatan** : Sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Walaupun keadaan alam yang sebagian besar adalah perbukitan yang kurang subur namun Kabupaten Bantul dikenal sebagai daerah pertanian yang potensial, karena dapat memajukan perekonomian masyarakat. Hal ini didukung dengan banyak sumber air, diantaranya adalah 6 sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul yaitu :

1. Sungai Oyo : 35,75 km
2. Sungai Opak : 19,00 km
3. Sungai Code : 7,00 km
4. Sungai Winongo: 18,75 km
5. Sungai Bedog : 9,50 km
6. Sungai Progo : 24,00 km

b. Tata Guna Tanah

Pada tahun 2006 tercatat bahwa wilayah Kabupaten Bantul yang memiliki luas 508,85 km² terdiri dari :

1. Lahan sawah : 16.033,96 hektar
2. Pekarangan : 20.460,24 hektar
3. Tegal/Ladang/Kebun : 6.647,97 hektar
4. Kolam/Tebat/Empang : 58,05 hektar
5. Tambak : 19,30 hektar
6. Rawa : 8,00 hektar
7. Lainnya : 7.457,48 hektar

B. Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 935 pedukuhan. Data tentang banyaknya kecamatan dan luasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan, Desa dan Pedukuhan
di Kabupaten Bantul
Tahun 2007

NO.	KECAMATAN	LUAS	DESA	PEDUKUHAN
1.	Srandakan	18,32 km ²	2	43
2.	Sanden	23,16 km ²	4	62
3.	Kretek	26,77 km ²	5	52
4.	Pundong	23,68 km ²	3	49
5.	Bambanglipuro	22,70 km ²	3	45
6.	Pandak	24,30 km ²	4	49
7.	Bantul	21,95 km ²	5	50
8.	Jetis	24,47 km ²	4	64
9.	Imogiri	54,49 km ²	8	72

10.	Dlingo	55,87 km ²	6	58
11.	Pleret	22,97 km ²	5	47
12.	Piyungan	32,54 km ²	3	60
13.	Banguntapan	28,48 km ²	8	57
14.	Sewon	27,16 km ²	4	63
15.	Kasih	33,38 km ²	4	53
16.	Pajangan	33,25 km ²	3	55
17.	Sedayu	34,36 km ²	4	54

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

C. Kependudukan

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per Kecamatan di

Kabupaten Bantul yaitu :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul
Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2006

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Th 2004		
		L	P	Jumlah
1.	Srandakan	15.119	15.950	31.069
2.	Sanden	16.644	17.619	34.263
3.	Kretek	15.149	16.327	31.476
4.	Pundong	15.764	16.792	32.556
5.	Bb.Lipuro	20.977	22.468	43.445
6.	Pandak	24.313	24.768	49.099
7.	Bantul	29.338	30.685	60.023
8.	Jetis	24.520	25.838	50.358
9.	Imogiri	27.939	29.561	57.500
10.	Dlingo	18.313	19.477	37.790
11.	Pleret	16.994	17.118	34.112
12.	Piyungan	18.937	19.544	38.481
13.	Banguntapan	42.302	43.751	86.053
14.	Sewon	39.484	38.658	78.142
15.	Kasih	40.054	40.105	80.159
16.	Pajangan	15.041	15.784	30.825
17.	Sedayu	22.144	23.060	45.204
Jumlah		403.032	417.523	820.555

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

Penduduk di Kabupaten Bantul didominasi oleh perempuan. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan yaitu 417.523 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 403.032 jiwa. Untuk jumlah penduduk perempuan terbesar terdapat di Kecamatan Banguntapan sebesar 43.751 jiwa dan terkecil di Kecamatan Pajangan sebesar 15.784 jiwa. Sedangkan penduduk laki-laki terbesar ada di Kecamatan Banguntapan sebesar 42.302 jiwa dan terkecil di Kecamatan Pajangan sebesar 15.041 jiwa.

D. Agama dan Sosio Kultural

Agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Bantul terdiri dari Islam, Katholik, Kristen, Hindu, dan Budha serta ada juga sebagian masyarakat yang menganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya agama dan aliran kepercayaan ini akan sangat membantu pembangunan moral masyarakat di Kabupaten Bantul.

Banyak karya-karya yang dihasilkan di Kabupaten Bantul, baik bersifat fisik maupun yang bersifat kerohanian yang telah berkembang dalam memberikan corak dan memperkaya kebudayaan. Upacara-upacara adat di Kabupaten Bantul masih sering dilaksanakan seperti Ruwahan, Saparan, Syawalan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan upacara adat, sering diadakan penyajian kesenian tradisional seperti wayangan dan jathilan.

E. Industri

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, jumlah industri kecil pada akhir tahun 2006 tercatat sebanyak 17.865 usaha dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 78.783 orang.

Sedangkan untuk industri besar/sedang tercatat 129 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 15.539 orang.

F. Kondisi Perekonomian

Perekonomian di Kabupaten Bantul terbentuk dari sektor-sektor yang saling mendukung satu sama lain. Indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di dalam suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator tersebut akan mampu memberikan indikasi tentang sejauh mana akifitas yang terjadi dalam suatu periode tertentu dapat menghasilkan pendapatan tambahan kepada masyarakat. Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada periode tertentu lebih besar dari periode sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. PDRB digunakan sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah angka-angka PDRB atas dasar harga konstan yang dimaksudkan agar pengaruh perubahan harga dalam pendapatan atas dasar harga berlaku telah diilangkan. Selain itu, ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan ditunjukkan dengan angka pertumbuhan pendapatan dengan atas dasar yang konstan. Data PDRB Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 1993
untuk tahun 2000-2003
(juta rupiah)

TAHUN	PDRB atas dasar harga berlaku	PDRB atas dasar harga konstan 1993
2000	2.259.481	845.718
2001	2.504.224	871.970
2002	2.784.440	903.932
2003	3.068.102	940.394

Tabel 4.4
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000
untuk tahun 2004-2006
(juta rupiah)

TAHUN	PDRB atas dasar harga berlaku	PDRB atas dasar harga konstan 2000
2004	4.238.736	3.080.312
2005	4.898.268	3.234.173
2006	5.725.366	3.299.646

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

Dari tabel 2.3 dan 2.4 menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Bantul untuk setiap tahunnya menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ditandai dengan PDRB yang selalu meningkat. Mulai tahun 2004, perhitungan PDRB menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.

G. Kondisi Perpajakan

Dilihat dari data target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2000 sampai tahun 2004, perkembangan penerimaan pajak di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini

mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik.

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2000-2007
(rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2000	1.407.752.000	1.522.121.141
2001	2.096.679.791	2.674.755.471
2002	4.803.611.193	4.888.906.500
2003	6.437.296.400	6.600.583.794
2004	6.951.700.000	7.085.891.785
2005	7.688.500.000	7.837.546.787
2006	5.501.466.000	9.836.300.000
2007	8.104.466.000	10.191.535.467

Sumber : Dipenda Kabupaten Bantul

Salah satu cara untuk memperoleh pemasukan dana bagi pemerintah daerah adalah melalui retribusi daerah. Hal ini disebabkan karena retribusi dikenakan pada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Kabupaten Bantul dimana daerahnya adalah daerah wisata, perdagangan, dan agraris merupakan suatu daerah yang cukup berpotensi untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Dengan kondisi wilayah demikian, maka memungkinkan untuk menjadikan penerimaan dari retribusi daerah sebagai andalan dari Kabupaten Bantul. Data penerimaan retribusi daerah dapat dilihat dalam tabel 4.6 di berikut :

Tabel 4.6
Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2000-2007

Tahun	Target (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2000	3.696.528.586	-	5.543.779.483	-
2001	5.752.550.000	55,62	7.111.430.707	28,3
2002	7.546.739.528	31,19	8.464.950.800	19,03
2003	9.269.383.218	22,82	11.081.466.167	30,91
2004	11.081.446.167	19,55	12.487.973.571	12,69
2005	23.343.945.500	110,66	23.800.473.870	90,59
2006	19.875.810.100	-14,86	22.451.031.417	-5,67
2007	27.329.135.150	37,50	30.808.408.803	37,22

Sumber : Dipenda Kabupaten Bantul

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun cenderung meningkatkan target penerimaan retribusi daerah, dan pada kenyataannya penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun meningkat, terkecuali untuk tahun 2006 yang mengalami penurunan. Realisasi penerimaan retribusi daerah yang melebihi target penerimaan retribusi daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat melakukan pemungutan retribusi pasar secara maksimal.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Undang –Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Bantul diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Pemerintah daerah bukan lagi sekedar pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai perencana dan juga evaluator kegiatan pembangunan itu sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, khususnya dalam era otonomi daerah, sebagai wujud desentralisasi, Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali sendiri sumber-sumber penerimaan daerah.

A. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

1. Analisis Efektivitas Retribusi Pasar

Analisis ini digunakan untuk mengukur hasil pungut dengan target Retribusi Pasar. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2001 : 263).

Untuk mengetahui Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten Bantul periode selama otonomi daerah digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100 \%$$

Contoh Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2001} &= \frac{\text{Rp } 4.494.577.833}{\text{Rp } 4.714.701.081} \times 100 \% \\ &= 95,33 \% \end{aligned}$$

Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah setiap tahun adalah :

$$\begin{aligned} 1. \text{ Efektivitas Tahun 2000} &= \frac{\text{Rp } 574.724.340}{\text{Rp } 550.000.000} \times 100 \% \\ &= 104,50 \% \end{aligned}$$

Efektivitas Retribusi Pasar tahun 2000 adalah 104,50 %.

$$\begin{aligned} 2. \text{ Efektivitas Tahun 2001} &= \frac{\text{Rp } 830.073.960}{\text{Rp } 791.176.000} \times 100 \% \\ &= 104,92 \% \end{aligned}$$

Efektivitas Retribusi Pasar tahun 2001 adalah 104,92 %.

$$\begin{aligned} 3. \text{ Efektivitas Tahun 2002} &= \frac{\text{Rp } 882.883.410}{\text{Rp } 957.067.220} \times 100 \% \\ &= 92,25 \% \end{aligned}$$

Efektivitas Retribusi Pasar tahun 2002 adalah 92,25 %.

$$\begin{aligned} 4. \text{ Efektivitas Tahun 2003} &= \frac{\text{Rp } 965.943.135}{\text{Rp } 957.069.180} \times 100 \% \\ &= 100,93 \% \end{aligned}$$

Efektivitas Retribusi Pasar tahun 2003 adalah 100,93 %.

$$5. \text{ Efektivitas Tahun 2004} = \frac{\text{Rp } 1.012.844.800}{\text{Rp } 1.001.739.300} \times 100 \% \\ = 101,11 \%$$

Efektivitas Retribusi Pasar tahun 2004 adalah 101,11 %.

$$6. \text{ Efektivitas Tahun 2005} = \frac{\text{Rp } 1.012.901.020}{\text{Rp } 1.001.868.900} \times 100 \% \\ = 101,10 \%$$

Efektivitas Retribusi Pasar tahun 2005 adalah 101,10 %.

$$7. \text{ Efektivitas Tahun 2006} = \frac{\text{Rp } 413.052.375}{\text{Rp } 390.364.850} \times 100 \% \\ = 105,81 \%$$

Efektivitas Retribusi Pasar tahun 2006 adalah 105,81 %.

$$8. \text{ Efektivitas Tahun 2007} = \frac{\text{Rp } 1.013.052.375}{\text{Rp } 1.000.000.000} \times 100 \% \\ = 101,36 \%$$

Efektivitas Retribusi Pasar tahun 2007 adalah 101,36 %.

Pada masa diberlakukannya otonomi daerah, tingkat efektivitas dari penerimaan Retribusi Pasar ditunjukkan oleh Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Efektivitas Retribusi Pasar
Kabupaten Bantul
Tahun 2000 s.d 2007

Tahun Anggaran	Target Retribusi Pasar	Penerimaan Retribusi Pasar	Tingkat Efektivitas (%)
2000	Rp 550.000.000	Rp 574.724.340	104,50
2001	791.176.000	830.073.960	104,92
2002	957.067.220	882.883.410	92,25
2003	957.069.180	965.943.135	100,93
2004	1.001.739.300	1.012.844.800	101,11
2005	1.001.868.900	1.012.901.020	101,10
2006	390.364.850	413.052.375	105,81
2007	1.000.000.000	1.013.633.425	101,36
Rata-rata			101,50

Sumber : data diolah

2. Analisis Efisiensi Retribusi Pasar

Analisis ini digunakan untuk mengukur biaya pemungutan Retribusi Pasar dengan realisasi penerimaan Retribusi Pasar. Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik (Halim, 2001 : 264).

Untuk mengetahui efisiensi Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul periode selama otonomi daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Retribusi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}} \times 100 \%$$

Contoh Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi tahun 2001} &= \frac{2.437.068.012}{4.494.577.833} \times 100 \% \\ &= 54,22\% \end{aligned}$$

Perhitungan Efisiensi Retribusi Pasar setiap tahun adalah :

$$1. \text{ Efisiensi Tahun 2000} = \frac{\text{Rp } 27.500.000}{\text{Rp } 574.724.340} \times 100 \% \\ = 4,78 \%$$

Efisiensi Retribusi Pasar tahun 2000 adalah 4,78 %.

$$2. \text{ Efisiensi Tahun 2001} = \frac{\text{Rp } 39.558.800}{\text{Rp } 830.883.410} \times 100 \% \\ = 4,77 \%$$

Efisiensi Retribusi Pasar tahun 2001 adalah 4,77 %.

$$3. \text{ Efisiensi Tahun 2002} = \frac{\text{Rp } 47.853.361}{\text{Rp } 882.883.410} \times 100 \% \\ = 5,42 \%$$

Efisiensi Retribusi Pasar tahun 2002 adalah 5,42 %.

$$4. \text{ Efisiensi Tahun 2003} = \frac{\text{Rp } 47.853.361}{\text{Rp } 965.943.135} \times 100 \% \\ = 4,95 \%$$

Efisiensi Retribusi Pasar tahun 2003 adalah 4,95 %.

$$5. \text{ Efisiensi Tahun 2004} = \frac{\text{Rp } 50.086.965}{\text{Rp } 1.012.844.800} \times 100 \% \\ = 4,95 \%$$

Efisiensi Retribusi Pasar tahun 2004 adalah 4,95 %.

$$6. \text{ Efisiensi Tahun 2005} = \frac{\text{Rp } 50.093.445}{\text{Rp } 1.012.901.020} \times 100 \% \\ = 4,95 \%$$

Efisiensi Retribusi Pasar tahun 2005 adalah 4,95 %.

$$7. \text{ Efisiensi Tahun 2006} = \frac{\text{Rp } 19.518.242}{\text{Rp } 413.052.375} \times 100 \% \\ = 4,73 \%$$

Efisiensi Retribusi Pasar tahun 2006 adalah 4,73 %.

$$8. \text{ Efisiensi Tahun 2007} = \frac{\text{Rp } 50.000.000}{\text{Rp } 1.013.633.425} \times 100 \% \\ = 4,93 \%$$

Efisiensi Retribusi Pasar tahun 2007 adalah 4,93 %.

Secara jelas, efisiensi Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul periode selama otonomi daerah di tunjukkan dalam Tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2
Efisiensi Retribusi Pasar
Kabupaten Bantul
Tahun 2000 s.d 2007

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Pasar	Biaya Pemungutan Retribusi Pasar	Tingkat Efisiensi (%)
2000	Rp 574.724.340	Rp 27.500.000	4,78
2001	830.073.960	39.558.800	4,77
2002	882.883.410	47.853.361	5,42
2003	965.943.135	47.853.459	4,95
2004	1.012.844.800	50.086.965	4,95
2005	1.012.901.020	50.093.445	4,95
2006	413.052.375	19.518.242	4,73
2007	1.013.633.425	50.000.000	4,93
Rata-rata			4,935

Sumber : data diolah

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar

Penerimaan retribusi di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja dari pemerintah sendiri dalam melakukan pemungutan kepada wajib retribusi. Untuk retribusi pasar, petugas pemungut melakukan tugasnya dengan dibawahi oleh seorang lurah pasar. Setiap lurah pasar membawahi beberapa pasar yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul adalah :

1. Sikap Aparat

Menurut Walgito seperti yang dikutip oleh Nofiasari (2004 : 35), sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai obyek dan situasi yang relatif tetap, disertai dengan adanya perasaan tertentu yang memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dengan cara tertentu yang dipilihnya. Sikap dan perilaku itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi.

2. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pasar sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi antara aparat pemungut dengan wajib retribusi. Menurut Nofiasari (2004 : 36), pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi dapat diterima dengan jelas apabila komunikan (wajib retribusi) mampu memahami isi pesan sesuai maksud komunikator (aparat pemungut). Namun dalam kenyataannya dalam proses penyampaian pesan terdapat gangguan

seperti sarana kurang mendukung, aparat kurang memahami isi pesan yang disampaikan sehingga tujuan komunikasi belum tercapai.

3. Aturan yang Berlaku

Aturan-aturan yang mengatur masalah retribusi pasar menjadi acuan pemerintah untuk melakukan pemungutan dan mengelolanya dengan benar. Selain peraturan dari pusat, masalah retribusi ini juga diatur dalam peraturan daerah tiap-tiap wilayah. Hal ini dilakukan karena adanya otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan daerah secara mandiri.

4. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar sangat penting kontribusinya untuk menjadikan retribusi pasar selalu menjadi andalan pemasukan pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

B. Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Retribusi Pasar

Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul periode selama berlakunya otonomi daerah pada umumnya efektif, kecuali untuk tahun 2002, dengan tingkat rata-rata sebesar 104,03%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bantul mengalami kemajuan dalam hal penerimaan Retribusi Pasar, sehingga mendukung pula kemajuan pembangunan di Kabupaten Bantul.

Pada tahun anggaran 2000 Kabupaten Bantul mulai memberlakukan otonomi daerah, sehingga waktu periode tahun ini memiliki rentang waktu yang lebih pendek. Pada tahun ini Kabupaten Bantul memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi, yaitu sebesar 104,50%. Hal ini disebabkan oleh jumlah penerimaan retribusi pasar telah melampaui target yang ditentukan.

Untuk tahun 2001, tingkat efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Bantul adalah 104,92%. Dari tahun sebelumnya berarti tahun 2001 ini mengalami perubahan sebesar 0,42%. Tingkat efektivitas tahun 2001 ini dapat dikatakan efektif karena berada di atas 100%. Hal tersebut dikarenakan oleh konsistensi dari Pemerintah Kabupaten Bantul tetap dapat mempertahankan tingginya realisasi retribusi pasar yang melebihi nilai yang ditargetkan.

Pada tahun anggaran 2002, tingkat efektivitas retribusi pasar adalah 92,25%, dimana mengalami penurunan berkisar 12,67% dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, penerimaan retribusi pasar dikatakan tidak efektif, karena nilainya berada di bawah 100%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan target penerimaan yang cukup tinggi dari sebelumnya, namun kenaikan realisasinya kurang dapat mengimbangi kenaikan target yang telah ditetapkan.

Tahun 2003 tingkat efektivitas retribusi pasar Kabupaten Bantul kembali efektif, yaitu berada di tingkat 100,93% sehingga dikategorikan bahwa penerimaan retribusi pasar tahun ini adalah telah efektif. Hal ini

dikarenakan oleh penetapan target penerimaan retribusi pasar dari tahun sebelumnya tidak berubah banyak.

Pada tahun 2004 dan 2005, tingkat efektivitas retribusi pasar berjalan efektif, yaitu berada di tingkat 100,11% dan 100,10%. Hal ini disebabkan oleh penentuan target yang diharapkan dapat diimbangi pula oleh realisasi dari penerimaan retribusi pasar.

Pada tahun 2006, tingkat efektivitas mengalami kembali peningkatan, yaitu sebesar 4,71% menjadi 105,81% walaupun sebenarnya target yang diharapkan diturunkan oleh pemerintah. Jadi penerimaan retribusi pasar tahun 2006 dikatakan efektif. Penurunan jumlah target penerimaan retribusi pasar dikarenakan terjadinya gempa bumi yang melanda Kabupaten Bantul, sehingga penerimaan retribusi hanya berjalan 5 bulan sampai sebelum 27 Mei 2006. Hal ini juga diimbangi oleh realisasi penerimaan retribusi yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, walaupun jumlahnya telah mencapai target yang ditentukan, sehingga berdampak pula pada tingkat efektivitas yang tinggi.

Pada tahun 2006 terjadi penurunan drastis jumlah target dan penerimaan retribusi pasar. Perubahan jumlah target pada tahun 2006 dilatarbelakangi terjadinya gempa bumi yang dikategorikan oleh pemerintah Kabupaten Bantul sebagai kejadian luar biasa, sehingga atas kebijakan Bupati Kabupaten Bantul maka anggaran pendapatan dan belanja daerah Bantul mengalami perubahan. Terjadinya gempa bumi mengakibatkan pemerintah Bantul membebaskan beberapa komponen

pendapatan, antara lain retribusi pasar dan pajak bumi dan bangunan. Target penerimaan retribusi pasar Kabupaten Bantul pada tahun 2006 sebelum revisi yaitu Rp 1.004.967.900,00.

Begitu pula untuk tahun 2007 dimana tingkat efektivitas yang walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 4,45%, namun dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi di Kabupaten Bantul telah efektif dan mengalami peningkatan jumlahnya.

Pada tahun anggaran 2000 sampai dengan periode tahun anggaran 2007 tingkat efektivitas mencapai rata-rata diatas 100%, berarti bahwa pada tahun anggaran tersebut pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target selalu mencapai angka 100%, kecuali untuk tahun 2002 yang berjalan tidak efektif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun anggaran 2000 sampai dengan 2007 penerimaan Retribusi Pasar memiliki jumlah melebihi target. Jumlah lebih dari penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut :

Tabel 5.3
Jumlah Lebih dari Penerimaan Retribusi Pasar
Kabupaten Bantul
untuk Tahun Anggaran 2000 – 2007
(rupiah)

Tahun Anggaran	Target Retribusi Pasar	Penerimaan Retribusi Pasar	Jumlah Lebih penerimaan Retribusi Pasar
2000	550.000.000	574.724.340	24.724.340
2001	791.176.000	830.073.960	38.897.960
2002	957.067.220	882.883.410	(74.183.810)
2003	957.069.180	965.943.135	8.873.955
2004	1.001.739.300	1.012.844.800	11.105.500

2005	1.001.868.900	1.012.901.020	11.032.120
2006	390.364.850	413.052.375	22.687.525
2007	1.000.000.000	1.013.633.425	13.633.425

Sumber : data diolah

Dari hasil tabel tingkat efektivitas membuktikan bahwa Kabupaten Bantul sudah dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang memiliki kinerja yang bagus dari segi efektivitas dalam penerimaan Retribusi Pasar.

2. Analisis Efisiensi Retribusi Pasar

Retribusi Pasar pada periode selama diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Bantul telah efisien, karena angkanya tidak mencapai 100%, yaitu berkisar dari 4,73% sampai dengan 5,42%, dengan tingkat rata-rata 4,935%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan semakin efisien dalam rangka pemungutan Retribusi Pasar. Dapat diartikan juga bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantul semakin bagus dalam pemungutan Retribusi Pasar.

Pada tahun anggaran 2000, tingkat efisiensi Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul sebesar 4,78%. Jadi dapat dikatakan bahwa retribusi pasar di Kabupaten Bantul pada tahun 2000 telah efisien. Hal ini disebabkan oleh kecilnya biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemungutan sehingga tingkat efisiensinya tinggi.

Pada dasarnya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan angka yang mencolok, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensi dari pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul berjalan stabil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah

untuk pemungutan dapat ditekan seminim mungkin, karena persentasenya sangat kecil.

Pencapaian tingkat efisiensi terbaik terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 4,73%. Sedangkan tingkat efisiensi yang terendah terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar 5,42%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah berhasil menekan biaya pemungutan seminimal mungkin, sehingga efisiensinya tinggi.

Dalam hal pemungutan Retribusi Pasar, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki kinerja yang bagus karena telah mencapai tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan pengertian efisien dari Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bantul telah berhasil dalam menggunakan sumber daya yang ada, sehingga dapat mengatur biaya yang seminimal mungkin untuk melakukan pemungutan Retribusi Pasar.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul adalah :

1. Sikap Aparat

Sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna dan corak pada perilaku atau perbuatan yang bersangkutan. Jadi dengan mengetahui sikap seseorang, orang akan mendapatkan gambaran perilaku yang timbul dari orang yang bersangkutan.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat dijelaskan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh petugas pemungut retribusi pasar dapat positif atau negatif. Perilaku aparat dikatakan negatif apabila perilakunya tidak sesuai atau menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dan perilaku aparat sangat dipengaruhi oleh adanya rasa tanggung jawab mereka terhadap tugasnya.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul adalah dalam melakukan tugas pemungutan, aparat di Kabupaten Bantul ternyata bersikap ramah dan sopan kepada wajib retribusi sehingga hal tersebut memberikan reaksi yang positif yaitu dari tahun ke tahun penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan secara bertahap, terkecuali adanya faktor gempa bumi yang dialami Kabupaten Bantul pada 27 Mei 2006 yang menyebabkan pemerintah harus membebaskan beberapa retribusi sampai tahun berikutnya.

Faktor lainnya yang sangat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar adalah peran aparat pemungut telah dikoordinasi oleh pihak terkait, yaitu aparat pemungut telah diawasi kinerjanya oleh seorang lurah pasar. Di Kabupaten Bantul sendiri terdapat 30 pasar dengan dibawah oleh 11 lurah pasar. Sedangkan retribusi jenis lainnya juga dibawah wewenang dari instansi-instansi tersendiri sesuai dengan bidang masing-masing.

Adapun faktor yang dapat dikatakan negatif adalah kurangnya bekal ataupun pengetahuan tentang masalah retribusi sendiri. Aparat

pemungut umumnya hanya menjalankan tugas memungut tetapi mereka kurang memahami tentang retribusi itu sendiri. Namun faktor ini tidak bersifat umum, karena ada beberapa aparat yang telah memahami pengetahuan mengenai jenis retribusi yang mereka pungut.

2. Kesadaran Masyarakat

Tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sangat terkait dengan tingkat kesadaran politiknya, yang pada hakekatnya bermula dari kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Makin tinggi kesadaran politik seseorang berarti makin tinggi pula kesadaran akan segala hak dan kewajibannya (Pasaribu, 1990 : 72).

Terkait dengan penelitian ini, masyarakat Kabupaten Bantul telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membayar retribusi pasar yang menjadi kewajibannya atas fasilitas yang dipakai. Hal tersebut dapat dilihat dari ketepatan waktu wajib retribusi membayar pungutan, tidak adanya tunggakan pembayaran retribusi, dan juga memahami akan kewajiban-kewajibannya. Tarif retribusi pasar di Kabupaten Bantul juga dirasa tidak memberatkan bagi masyarakat karena masih terjangkau. Hanya saja sarana dan prasarana yang mendukung seringkali belum maksimal sehingga masih ada kecenderungan beberapa masyarakat menilai bahwa pemerintah belum serius menangani obyek dari retribusi daerah di Kabupaten Bantul.

3. Aturan Yang Berlaku

Di Kabupaten Bantul pemerintah telah berupaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan masalah retribusi. Penyuluhan oleh pamong (misalnya dari Dinas Pendapatan Daerah) dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) bulan sekali. Hanya saja penyuluhan terkadang hanya bersifat kunjungan atau inspeksi mendadak disertai dengan tanya jawab oleh pamong kepada pedagang. Begitu pula tentang adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam peraturan umumnya dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu sehingga masyarakat juga mengetahui.

Hanya saja beberapa faktor yang menghambat adalah sikap dari masyarakat yang kurang proaktif terhadap perubahan peraturan tersebut. Hal ini umumnya disebabkan karena perubahan aturan yang terjadi terkadang dirasa kurang memihak masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengupayakan sarana dan prasarana terkait masalah obyek retribusi.

4. Peran Pemerintah

Peran pemerintah di Kabupaten Bantul dinilai masih kurang, terutama dalam transparansi pemerintah dalam mengelola pemasukan dari penerimaan retribusi daerah. Laporan kepada masyarakat dilakukan sebatas sebagai laporan yang diajukan ke pemerintah daerah, dan masyarakat hanya bisa mengakses langsung ke pemerintah, atau misalnya melalui Badan Pusat Statistik. Namun hal tersebut dinilai

sebagai hal yang wajar karena umumnya pedagang tidak mempermasalahkan dan ingin tahu mengenai laporan keuangan terkait apa yang telah mereka bayar ke pemerintah.

Walaupun begitu, pemerintah Kabupaten Bantul dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik dalam hal memungut dan mengelola penerimaan retribusi pasar, yaitu dengan memberikan kompensasi, baik kepada wajib retribusi maupun kepada aparat pemungut. Kompensasi kepada aparat pemungut biasanya berbentuk insentif, ataupun untuk wajib retribusi yaitu berupa pelayanan yang maksimal untuk wajib retribusi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari perhitungan yang telah dilakukan, efektivitas penerimaan Retribusi Pasar pada masa diberlakukannya otonomi daerah, yaitu pada tahun 2000 sampai dengan 2007 berkisar antara 92,25% hingga 105,81%. Berdasarkan analisis efektivitas, penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul efektif, kecuali pada tahun anggaran 2002 yang dikategorikan tidak efektif karena persentasenya dibawah 100%. Dengan demikian, penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul telah efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai telah lebih dari 100%, kecuali untuk tahun 2002.
2. Efisiensi dari Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul setiap tahunnya pada masa diberlakukannya otonomi daerah, yaitu pada tahun 2000 hingga 2007 dikategorikan efisien, yaitu berkisar antara 4,73% sampai dengan 5,42%. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul telah efisien.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul adalah sikap aparat, kesadaran masyarakat, aturan yang berlaku dan peran pemerintah. Faktor-faktor tersebut secara umum

dikatakan positif karena faktor-faktor penghambat masih dapat diminimalisir sehingga penerimaan retribusi daerah secara umum mengalami peningkatan tiap tahunnya. Yang menjadi faktor-faktor penghambat yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki aparat tentang retribusi pasar, kekurang-puasan masyarakat akan timbal balik yang diberikan pemerintah (misalnya sarana pendukung yang kurang memadai), dan sikap dari masyarakat yang dinilai kurang proaktif dan peduli dalam menyikapi perubahan aturan-aturan yang terjadi, walaupun pemerintah telah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menghadapi keterbatasan dalam penelitian, yaitu tidak adanya ukuran yang pasti mengenai batasan tingkat efektivitas, sehingga penulis hanya menarik kesimpulan berdasarkan pendapat Halim (2004 : 135), yaitu kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya rasio yang khusus yang berlaku untuk menentukan apakah suatu unit pertanggungjawaban dapat dikatakan efisien atau tidak efisien. Sedangkan untuk biaya pemungutan, penulis hanya menetapkan sebesar 5% dari target penerimaan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga penulis tidak mengetahui biaya pemungutan yang sebenarnya.

Dalam hal mekanisme pengisian kuesioner, penulis hanya menyebarkan kuesioner kepada pihak pemerintah, yaitu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul yang mengurus masalah retribusi pasar. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa pemerintah lebih memahami sikap-sikap wajib retribusi, prosedur yang harus ditempuh, peraturan yang ditetapkan sehingga diharapkan tidak menimbulkan bias. Walaupun begitu hasil yang diperoleh juga didukung oleh opini yang lain, yaitu penulis melakukan kroscek kepada masyarakat (dalam hal ini adalah pedagang) karena akan memperkuat juga pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari kuesioner, sehingga semaksimal mungkin tidak terjadi kerancuan dalam analisis hasil pengisian kuisisioner.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mempunyai saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui Retribusi Pasar, aparat Dinas Pendapatan Daerah agar lebih mengembangkan pengetahuan mengenai hal retribusi daerah, tidak hanya sebatas menjalankan tugas memungut saja.

2. Bagi peneliti berikutnya.

Penelitian yang dilakukan berikutnya akan lebih baik jika rentang waktu yang digunakan lebih lama, atau dapat membandingkan pula dengan masa sebelum otonomi daerah serta dapat menggunakan kriteria hasil perhitungan efektivitas dan efisiensi dari sumber yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, David A. and George S. Day (1986). *Marketing Research*. 3rd Edition. New York : John Willey and sons
- Arikunto, Suharsimi (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Boedijoewono, Noegroho (2001). *Pengantar Statistika Ekonomi dan Perusahaan*. Jilid 1. Edisi ke-3. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey dan Roy Kelly (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerjemah: Masri Maris. Jakarta : UI Press
- Goedhart, C. (1975). *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*. Penerjemah : Ratmoko, SH. Penerbit Jambatan
- Halim, Abdul (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Irawan dan Suparwoko (1982). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-3. Yogyakarta : BPF
- Indriantono, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPF
- Kountour, Ronny (2003). *Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Penerbit PPM
- Mardiasmo (2003). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mason, Robert D., dan Douglas A. Lind (1999). *Teori Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 9. Jilid 2. Penerjemah : Widnyono Soetjipto dkk. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Pamudji (1980). *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Yogyakarta : Ichtiar
- Prakosa, Kesit Bambang (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press
- Sigit, Soehardi (2001). *Metode Penelitian*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Penerbit BPF UST

- Soeratno dan Suparmono (2002). Urgensi Pajak Daerah dan Penghasilan Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE YKPN*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Soetrisno (1981). *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta : BPFE
- Sugandha, Daan (1981). *Masalah Otonomi dan Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi 1. Bandung : Penerbit CV Sinar Baru
- Supramono (2003). Posisi Pajak dan Retribusi Sebagai Sumber Penerimaan Daerah di Kota Semarang. *Jurnal Studi Pembangunan*. Volume XV No.1 halaman 37-54
- Supranto, J (2000). *Statistik : Teori dan Aplikasi*. Jilid 1. Edisi ke-6. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Undang-undang No.32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Widjaja, HAW (1989), *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

KUISIONER

Berikanlah tanggapan Anda terkait dengan pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda *check*/silang (v/x) pada setiap jawaban yang Anda anggap paling sesuai !

Keterangan :

Y = Ya

T = Tidak

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah

No.	Pernyataan	Y	T
1.	Masyarakat telah menyadari untuk perlunya membayar retribusi daerah		
2.	Tarif retribusi dirasa tidak memberatkan (murah) bagi masyarakat		
3.	Sarana dan prasarana yang mendukung mendorong masyarakat taat membayar retribusi		
4.	Aturan-aturan tentang retribusi telah dimengerti oleh masyarakat (walaupun hanya sedikit)		
5.	Masyarakat bersikap proaktif terhadap perubahan aturan (misalnya tarif)		
6.	Aturan-aturan dan perubahannya disosialisasikan terlebih dahulu oleh pihak terkait agar masyarakat tidak bingung		
7.	Petugas/aparat pemungut bersikap ramah/baik/sopan dalam hal pemungutan		

8	Peran petugas pemungut telah diawasi/dibawasi oleh pihak yang terkait (misal lurah pasar)		
9.	Petugas/aparat pemungut telah dibekali dengan pengetahuan masalah retribusi		
10.	Pemerintah memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai retribusi (aturan-aturannya)		
11.	Pengelolaan pemasukan dari penerimaan retribusi dilakukan secara transparan (dengan laporan kepada publik)		
12.	Pemerintah memberikan kompensasi kepada para wajib retribusi ataupun petugas pemungut		

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah : (sebutkan jika ada)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Hal-hal yang menghambat dalam penerimaan retribusi daerah : (sebutkan jika ada)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Anda menjawab pertanyaan diatas.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa sajakah jenis-jenis retribusi daerah di Kabupaten Bantul?
2. Instansi mana sajakah yang membawahi masing-masing dari retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul tersebut?
3. Apakah pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan penyuluhan mengenai retribusi daerah kepada masyarakat?, berapa kali frekuensinya?, siapakah yang memberi penyuluhan tersebut?
4. Apa sajakah yang menjadi kendala/menghambat pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Bantul?
5. Bagaimana peran Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola penerimaan retribusi daerah?
6. Bagaimana perkembangan penerimaan retribusi daerah pada umumnya di Kabupaten Bantul setelah diberlakukannya otonomi daerah?
7. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bantul?
8. Apakah aturan-aturan mengenai retribusi daerah di Kabupaten Bantul ini dapat diterapkan di masyarakat (bersifat mengikat)?
9. Sejauh manakah timbal balik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang telah membayar retribusi daerah?
10. Apakah selama ini pemerintah Kabupaten Bantul sering menerima pengaduan dari masyarakat tentang retribusi daerah?, tentang apa dan bagaimana pemerintah menanggapi?



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monev insidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070 / 570

Membaca Surat : Dari : USD. Yogyakarta Nomor : 31/Kaprodi Man/215/V/08
Tanggal : 03 Mei 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada

Nama : **TIFFANY LEMBAH REDATI**
No.Mhs./NIM 032114069 Mhs : USD. Yogyakarta

Judul : ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RESTRIBUSI DAERAH PADA MASA DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH

Lokasi : Kantor DIPENDA Kab. Bantul.

Waktu : Mulai Tanggal : **06 Mei 2008 s/d 06 Agustus 2008**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/ Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada Tanggal : **06 - 05 - 2008**

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Bpk. Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul
3. Ka. DIPENDA Kab. Bantul.
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal

An. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris
Ub. Ka Sub Bag Umum

Dra. Esti Widjajanti
NIP. 070016997